



2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKjIP) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah YME dengan segala rahmat dan izinNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat telah disusun dan dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2024. Dengan tujuan sebagai perwujudan kinerja instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance).

Dalam penyusunan LKjIP Dinas perhubungan Kabupaten Pasaman Barat masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran yang positif dan kritik yang konstruktif guna mengembangkan kinerja peneliti sehingga LKjIP tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengambil langkah – langkah kebijakan pada masa yang akan datang.

Simpan Empat, Januari 2025

Kepala Dinas Perhubungan

BAKARUDDIN. SH

Pembina Tk I /IV/b

NIP. 19681002 199212 1 001

IKTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas / kegiatan sekarang ini berpedoman kepada Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi wewenang atau yang telah dimanahkan / digariskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagai suatu instansi yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, maka Dinas Perhubungan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan Pelayanan atau Pembinaan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas Aparatur serta mendorong terwujudnya capaian kinerja dengan melaksanakan program – program dan kegiatan terarah, berdasarkan Renstra 2021 – 2026 dan mengaplikasikan kepada kegiatan – kegiatan tahunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan, maka dalam rangka pertanggungjawaban kinerja Dinas perhubungan dalam pelaksanaan tugas menetapkan 6 Indikator Kinerja Sasaran yang menjadi Pedoman dan pengukuran Kinerja Instansi, Yaitu :

1. Rasio Konektifitas Kabupaten
2. Persentase layanan angkutan
3. V/C ratio di Jalan Kab/Kota
4. % penurunan Temuan BPK
5. Indek Kepuasan Masyarakat
6. Nilai Sakip
7. Level Maturitas SIPD

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dari rata- rata capaian 6 (enam) indicator kinerja sasaran tersebut dapat dinyatakan baik dari targer yang telah ditetapkan.

Dari segi pendanaan, dalam Tahun 2024 nilai capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dengan total Pagu dana Rp. 6.388.433.991,00 pada APBD Perubahan, terealisasi sebesar Rp. 6.126.729.737,00 (95.90 %),

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Organisasi	1
A.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
A.II Peran Strategis Dinas Perhubungan	2
A.III Struktur Organisasi	5
A.IV Sumber Daya Aparatur.....	5
B. Aspek Startegis Organisasi	8
C. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	8
D. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP.....,	9
E. Sistematika Penyajian.....	
BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS.....	11
A. Perencanaan Startegis	14
B. Perjanjian Kinerja	
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja.....	17
B. Hasil Pengukuran Kinerja.....,,	18
C. Capaian Kinerja Organisasi	18
C.1 Perbandingan Antara Target dan realisasi kinerja Tahun 2024.....	
C.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	24
C.3 Perbandingan Realisasi kinerja Sampai Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam dokumen Perencanaan Strategis Dinas perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.....	25
C.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Kementrian Perhubungan).....	25
C.5 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis	
	iii

Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	28
D. Realisasi Anggaran.....	30
BAB IV : PENUTUP.....	34
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Esselon II, III, IV dan Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.	
2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja OPD Tahun 2024	
3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	
4. SK IKU	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan good governance dan clean government sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pelaporan Kinerja bertujuan memberikan Informasi capaian Kinerja yang terukur atas target kinerja yang dijanjikan. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas perhubungan Kabupaten Pasaman Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjian pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. GAMBARAN ORGANISASI

B.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dari Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perhubungan

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan strategis pada Dinas Perhubungan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Perhubungan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Perhubungan;
- e. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan pada Bidang Perhubungan;
- f. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Perhubungan;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- h. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan Bidang Perhubungan;
- i. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

B.II PERAN STRATEGIS

Peran Strategis Dinas Perhubungan adalah :

1. Menata Transportasi dalam rangka memperlancar Pembangunan Daerah
2. Menjadikan Transportasi sebagai penunjang, pendorong dan penggerak roda Perekonomian
3. Menjadikan Transportasi memperkuat rasa persatuan dan kesatuan berbangsadan bernegara

B.III STRUKTUR ORGANISASI

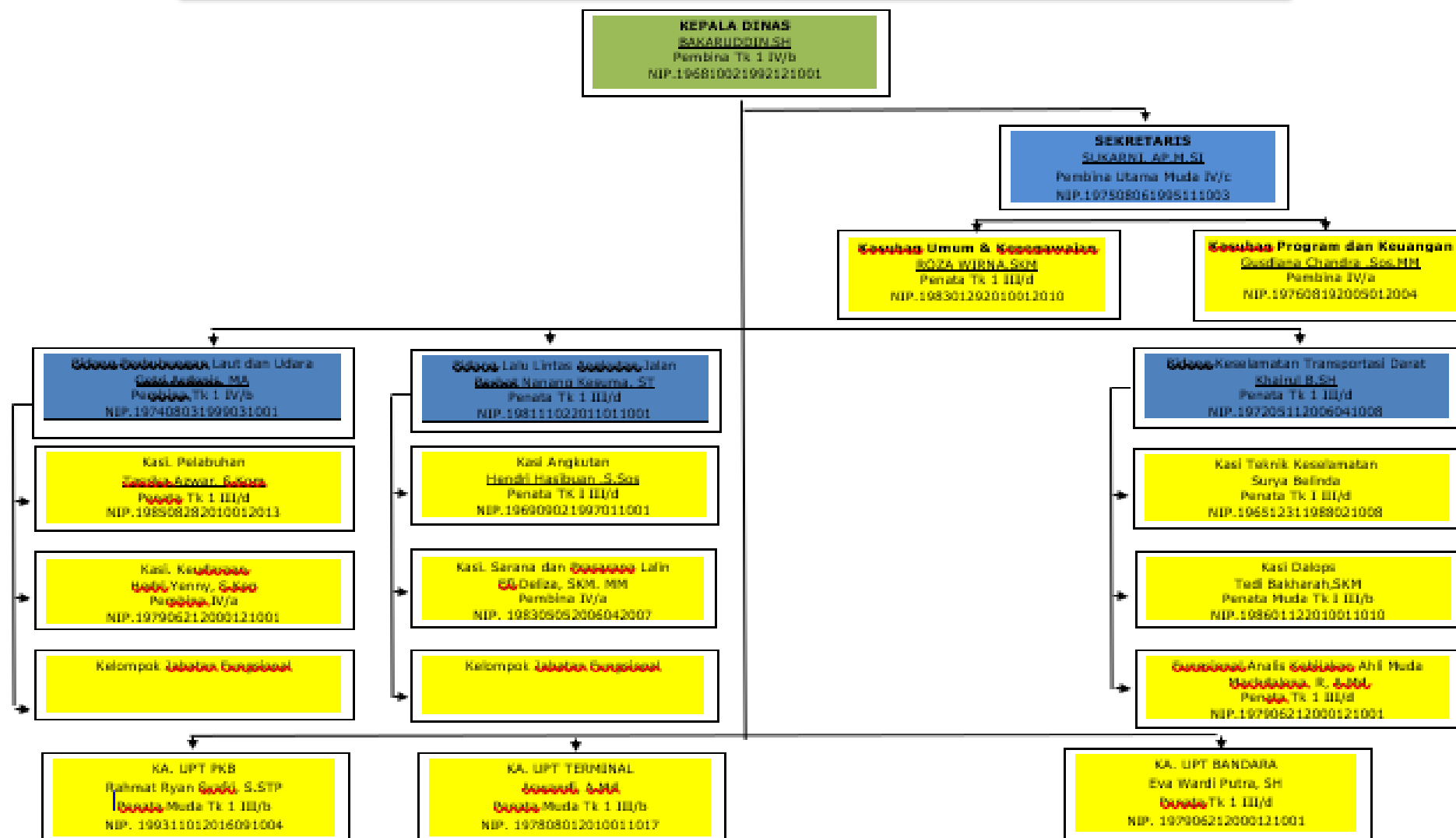
Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dengan susunan sebagai berikut :

•	Kepala Dinas	BAKARUDDIN, SH
•	Sekretaris	SUKARNI, AP. M.Si
•	Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	BERHAT NANANG KESUMA, ST
•	Kabid Perhubungan Laut dan Udara	GETRI ARDENIS, MA
•	Kabid Keselamatan Transportasi Darat	KHAIRUL B, SH
•	Kasubag Umum dan Kepegawaian	ROZA WIRNA, SKM
•	Kasubag Program dan Keuangan	GUSDIANA CHANDRA, S. Sos. MM
•	Kasi Sarana dan Prasarana	EFI DELIZA, SKM. MM
•	Kasi Angkutan	HENDRI HASIBUAN, S. Sos
•	Jabatan Fungsional	-
•	Kasi Pelabuhan	TASRIKA AZWAR, S.KOM
•	Kasi Keudaraan	HEDRI YENNY, S. Kep
•	Jabatan Fungsional	-
•	Kasi Pengendalian Operasional dan Penertiban	TEDI BAKHARAH, SKM
•	Kasi Teknik Keselamatan	SURYA BALINDA
•	Fungsional Analis Keb. Ahli Muda	MACHDALENA, A. Md
•	KA. UPT PKB	RAHMAT RYAN SYAFRI, S.STP
•	KTU UPT PKB	RONI SURYANTO
•	KA. UPT TERMINAL	ASWANDI, A. Md
•	KTU UPT TERMINAL	YONES AURI, S. AP

•	KA. UPT BANDARA	EVA WARDI PUTRA, SH
•	KTU UPT BANDARA	DANI NASHRUL HADY PRANATA, S. Tr. Tra
•	STAF	NASTIAN, SE
•	STAF	JON ENDRI, S.ST. Pi
•	STAF	FITRIA, S.Tr. Tra
•	STAF	FAKHRIYAH PUTRI DEAIKA, S.Tr. Tra
•	STAF	MUHAMMAD RIEVANI ARDHIKA, S.Tr. Tra
•	STAF	BAGUS ANANDA RIYADI
•	BENDAHARA BARANG	SANARA MUDA, A.Md. LLASDP
•	BENDAHARA PENERIMAAN	DESI OKTAVIANI, A.Ma. PKB
•	STAF	RAHMI LIDYA, A.Ma. PKB
•	STAF	YOGI FEBRIANDI, A.Ma. PKB
•	BENDAHARA PENGELUARAN	MUHAMAD SUMARGONO, A.Md. Tra
•	STAF	ONDO KURNIA PUTRA, A.Md. Tra
•	STAF	SERENA, A.Md. Tra
•	STAF	WIDYA ULFA, A.Md. Tra



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TH 2023**



a. SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat tanggal 31 Desember 2024 adalah sebanyak 113 (Seratus lima Belas) orang dengan tingkatan sebagai berikut :

Golongan (Pegawai Negeri)	Keadaan 31 Desember 2024 (orang)
IV	6
III	19
II	8
I	-
PTT/ Honor daerah	11
THL	69
Jumlah	113

Pendidikan PNS	Keadaan 31 Desember 2024 (orang)
S3	-
S2	5
S1	18
DIII	6
DII	3
DI	0
SLTA	1
SLTP	-
SD	-
Jumlah	33

b. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun perekonomian di Kabupaten Pasaman Barat. Masih banyak permasalahan di bidang Perhubungan yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Secara umum, sektor Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dikategorikan ke dalam tiga bagian yaitu perhubungan Darat, perhubungan Laut dan Perhubungan udara. Dengan berbagai keterbatasan yang ada baik dana maupun personil serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada bidang Perhubungan maka Dinas Perhubungan, Kabupaten Pasaman Barat memiliki beberapa permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan, baik ditempat tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih seringnyaterjadi kecelakaan lalulintas.

- Kondisi terminal kurang memenuhi persyaratan pelayanan angkutan yang diindikasikan dengan kurang tersedianya lahan sesuai pelayanan dan adanya aksesibilitas dari dan ke terminal yang masih terhambat oleh aktivitas lain.
- Sumber daya manusia yang mempunyai *basic* pengetahuan di bidang transportasi, kelalulintasan jumlah dan kualitasnya belum mencukupi.
- Kepatuhan masyarakat terhadap Undang – Undang Lalu lintas dan belum membudaya sehingga masih harus selalu dikembangkan dan diawasi.
- Kurangnya sarana mobilitas aparat Dinas Perhubungan,
- Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih terbatas, walaupun setiap tahun terjadi peningkatan izin trayek, angkutan pedesaan namun tingkat kelaikan armada umumnya masih rendah.
- Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat kurang disiplinnya pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada; rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; *law enforcement* peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas.
- Optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah, serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dsb;

Tabel

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penurunan pertumbuhan ekonomi	Masih tingginya angka kemiskinan	Permasalahan infrastruktur perhubungan dan telekomunikasi yaitu kelanjutan pembangunan pelabuhan teluk tapang dan pelabuhan udara pusako anak nagari serta penuntasan kawasan-kawasan yang masih blankspot

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten

Pasaman Barat dapat diperoleh melalui analisis Renstra

No	Kondisi Eksisting	Tantangan	Peluang	Arah Pengembangan Pelayanan
1	Penurunan level Of Servise (Los) jalan yang ditandai	Pertumbuhan jumlah kendaraan tidak berbanding lurus dengan	1. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian Operasional lalu	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Lalu intas dalam rangka peningkatan Level

	peningkatan rasio volume dibandingkan kapasitas jalan salah satunya disebabkan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor pribadi	pertumbuhan prasarana jalan dan Kurangnya fasilitas perlengkapan Jalan, mengakibatkan penurunan tingkat keselamatan lalu lintas jalan	lintas jalan ² 2. Terlaksananya pemasangan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan 3. Terseenggaranya manajemen dan rekayasa lalu lintas.	Of Service (LoS) jalan
2	Naiknya tingkat pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan	Disiplin berlalu lintas pengguna jalan relative rendah, sehingga sering mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan	1. Terlaksananya sosialisasi tentang tertib berlalu lintas 2. Melaksanakan razia gabungan dalam rangka penertiban pengendara	Pelaksanaan razia gabungan secara rutin dan berkala
3	Angkutan umum yang tidak teratur	Jaringan trayek belum terstruktur, teratur dan terpadu, mengakibatkan pelayanan angkutan umum belum efisien	1. Membuat jaringan trayek ANGKOT, ANGDES. 2. Sosialisasi angkutan Umum 3. Rakor dengan Pengguna dan Operator Angkutan Umum	Sosialisasi Angkutan Umum
4	Angkutan Umum yang tidak sesuai dengan standard pelayanan	Usia kendaraan angkutan umum yang beroperasi di jalan rata – rata diatas 10 Tahun, mengakibatkan pelayanan angkutan umum tidak optimal dan menyebabkan kecelakaan	1. Membuat konsesi dengan penyedia Kendaraan 2. Membuat subsidi agar pelayanan angkutan umum semakin digemari	Penerapan Subsidi Angkutan Umum
5	Masih kurangnya pendidikan dan Pelatihan Teknis perhubungan untuk meningkatkan kompetensi SDM Perhubungan	Masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang Perhubungan	Kewenangan pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan memerlukan tenaga SDM penegak Hukum bidang Perhubungan (PPNS)	Dengan peningkatan kompetensi SDM Perhubungan dapat mewujudkan pelayanan yang optimal
6	Kurangnya anggaran dalam melaksanakan kegiatan	Terbatasnya anggaran bidang perhubungan	Dukungan Kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari pemerintah pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagai factor keberhasilan pelaksanaan tugas Perhubungan	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang diperlukan

C . PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Isu Strategis adalah kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan-pilihan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat pada waktu sekarang dan di masa depan. Isu – isu kritical yang mencerminkan persoalan yang berkepanjangan yang dihadapi oleh Sektor Perhubungan Di Kabupaten Pasaman Barat atau kegiatan – kegiatan sekarang yang diantisipasi mempunyai dampak yang sangat nyata terhadap kinerja Sektor Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan hasil analisa tim penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat, memperhatikan analisa lingkungan eksternal, internal, tantangan, kekuatan dan kelemahan Dinas Perhubungan, Kabupaten Pasaman Barat dalam 5 (Lima) tahun kedepan, faktor yang berpengaruh terhadap permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan, Kabupaten Pasaman Barat, maka dapat dirumuskan isu - isu strategis sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen transportasi yang perlu dilaksanakan karena diperlukan dalam rangka pertimbangan pengambilan kebijakan.
2. Fasilitas sarana dan prasarana perhubungan yang kurang mencukupi sehingga pelayanan perhubungan kurang maksimal.
3. Kurangnya Konektivitas antar jalan dan angkutan umum sehingga kurangnya aksesibilitas dan mobilitas yang ada.
4. Data inventarisasi jalan yang kurang lengkap sehingga perlu dilakukan pendataan yang dilakukan secara berkala setiap tahun.
5. Angkutan umum yang perlu dilakukan pengawasan dan pengatur dalam semua sektor angkutan umum darat, laut dan udara.

D . MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKJIP) mempunyai dua fungsi utama, pertama Laporan Akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh Stakeholder. Kedua, Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Maksud dan tujuan penyusunan LKJIP Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJIP Dinas perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang berhasil dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi. Misi dan tujuan / sasaran strategis telah dicapai sampai Tahun 2024.
2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan interna organisasi, menjadikan LKJIP Tahun 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Dinas perhubungan Kabupaten Pasaman Barat sebagai upaya – upaya perbaikan kinerja dimasa yang akan datang, setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKJIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 disajikan berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Lampiran II. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi pemerintah Dinas perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Organisasi
 - B.1 Tugas Pokok dan Fungsi
 - B.II Peran Strategis Dinas Perhubungan
 - B.III Struktur Organisasi
 - B. IV Sumber Daya Aparatur
- C. Aspek Startegis Organisasi
- D. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- E. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP
- F. Sistematika Penyajian

BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS

- Perencanaan Startegis
- Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- a. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
- b. Hasil Pengukuran Kinerja
- c. Capaian Kinerja Organisasi
 - C.1 Perbandingan Antara Target dan realisasi kinerja Tahun 2024
 - C.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
 - C.3 Perbandingan Realisasi kinerja Sampai Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam dokumen Perencanaan Strategis Dinas perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.
 - C.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Kementrian Perhubungan)
 - C.5 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.
- d. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

KESIMPULAN

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran dan hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 Tahun yaitu 01 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2024 - 2026 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Pasaman Barat Bermatabat, Agamais, Maju dan Sejahtera.”

Sedangkan Misi bupati dan wakil Bupati terpilih tersebut adalah

“Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif”

Berdasarkan Visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih, tugas pokok dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Tugas pokok ini mencerminkan misi wewujudkan perekonomian yang tangguh dan berdaya saing. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat menyelenggarakan fungsi – fungsi yaitu Penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah daerah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat pada saat ini antara lain : Meningkatkan kapasitas kelenmbagaan dan sumber daya manusia aparatur memiliki tujuan untuk menciptakan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik dan berkarakter akhlaqul karimah, bersih dan professional, meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan, terjangkau dan ramah lingkungan memiliki tujuan untuk meningkatkan daya dukung dan kualitas penyelenggaraan perhubungan dan meningkat kualitas pelayanan perhubungan handal, terjangkau dan ramah lingkungan.

PERNYATAAN VISI

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan yang menyangkut kemana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipasif, inovatif serta produktif. Visi merupakan gambaran yang menantang tentang

keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin di wujudkan instansi pemerintah.

Mengacu pada batasan tersebut dan mengacu pada visi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yaitu :

“Terwujudnya Pasaman Barat yang beriman, cerdas, sehat, bermatabat, sejahtera serta berwawasan lingkungan”.

PERNYATAAN MISI

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus di emban dan di laksanakan oleh instansi Pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal peran serta instansi pemerintah dalam penyelenggaraan Negara.

Sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan maka dibuatlah misi untuk mencapai visi tersebut. Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat mendukung tercapainya Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Misi 2, Misi 5 dan Misi 6 Yaitu :

- **Misi 2 yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berwawasan kependudukan (Population responsive dan gender responsive).**
- **Misi 5 yaitu Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.**
- **Misi 6 yaitu Mewujudkan pembangunan wilayah yang berkeadilan, serta mengelola sumber daya alam dan penataan ruang secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan**

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau di hasilkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan di capai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran diupayakan untuk dapat di capai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan visi dan misi di atas telah ditetapkan tujuan dan sasaran strategis pembangunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.

Tujuan yang ingin dicapai adalah Menjadikan Kabupaten Pasaman Barat yang berkembang tertib melalui transportasi yang aman, nyaman dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna jasa transportasi

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka tujuan dan sasaran pembangunan di sektor Perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA				
1	Terselenggaranya Sistem Pelayanan Transportasi Yang dapat mengembangkan konektivitas wilayah		Rasio Konektivitas Kabupaten	1,8	1,9	2	2,1	2,1
		Meningkatnya konektivitas angkutan umum dan konektivitas jalan	Persentase layanan angkutan darat	40%	45%	50%	50%	60%
			Rasio Konektivitas Kabupaten	1,8	1,9	2	2,1	2,1
			V/C Ratio di Jalan Kab/Kota	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4
2	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan		% Penurunan Temuan BPK	4%	3%	2%	1%	0%
			Nilai SAKIP	70	70	70	80	80
			Level Maturitas SPIP	3	3	3	4	4
		Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	% Penurunan Temuan BPK	4%	3%	2%	1%	0%
			Indek kepuasan Masyarakat	-	90 %	90 %	90 %	90 %
			Nilai SAKIP	70	70	70	80	80
			Level Maturitas SPIP	3	3	3	4	4

B. PERJANJIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Perjanjian Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah rencana pencapaian target yang menjadi sasaran bagi Dinas perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Pembangunan Perhubungan di Kabupaten Pasaman Barat dalam kurun waktu 5 tahun dan Tahun 2024 adalah Tahun awal untuk Renstra Dinas perhubungan periode tahun 2021 – 2026, dikarenakan untuk Tahun 2021 merupakan bagian dari Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021 dan merupakan tahun dasar (kondisi awal) terhadap target pada tahun 2024.

**PERJANJIAN KINERJA
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

OPD : DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya konektivitas angkutan umum dan konektivitas jalan	Persentase layanan angkutan	50%
		Rasio Konektivitas Kabupaten	2
		V/C Ratio di Jalan Kab	0.5
2.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Penurunan Temuan BPK	2%
		Indek Kepuasan Masyarakat	90%
		Nilai Sakip	70
		Level Maturitas SPIP	3

Program		Anggaran	Ket
I	Program Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten	4.647.018.863,00	APBD
II.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.645.126.000,00	APBD
III	Program Pengelola Pelayaran	165.036.000,00	APBD
	JUMLAH	6.457.180.862,00	APBD

Perubahan anggaran menyesuaikan dengan kondisi anggaran setelah anggaran Perubahan, dimana terjadi perubahan pagu dana Program dan kegiatan yang bertujuan untuk efektifitas dalam kebutuhan pelaksanaan realisasi keuangan.

Perubahan yang dilakukan dalam rencana pencapaian target kinerja perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 yaitu :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

OPD : DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya konektivitas angkutan umum dan konektivitas jalan	Rasio Konektivitas Kabupaten	2
		Persentase layanan angkutan	50%
		V/C Ratio di Jalan Kab	0.5
2.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Penurunan Temuan BPK	2%
		Indek Kepuasan Masyarakat	90 %
		Nilai Sakip	70
		Level Maturitas SPIP	3

Program		Anggaran	Ket
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	4.581.484.971,00	APBD
II.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.736.963.220,00	APBD
III	Program Pengelola Pelayaran	69.985.800,00	APBD
JUMLAH		6.388.433.991,00	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodic. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui seisih atau celah kinerja (Performance gap), berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis dan evaluasi bak terhadap kinerja maupun terhadap penggunaan sumber daya untuk menetapkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan dating (performance improvement). Laporan Kinerja Tahunan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Sebagai informasi tambahan Metodologi pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan cara melakukan perbandingan antara target rencana kinerja dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat meliputi pencapaian target indicator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahunan,

Tabel III.1 Klasifikasi Penilaian Keberhasilan / kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Klasifikasi	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53 % - 68%	Cukup
4	<53%	Kurang

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Dari 2 sasaran strtegis ditetapkan 6 indikator kinerja sasaran sebagai ukuran keberhasilan kinerja Dinas perhubungan Tahun 2024, Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rasio Konektifitas Kabupaten
2. Persentase layanan angkutan
3. V/C ratio di Jalan Kab/Kota
4. % penurunan Temuan BPK
5. Indek Kepuasan Masyarakat
6. Nilai Sakip
7. Level Maturitas SIPD

Tabel III.2 Hasil Pengukuran Kinerja dari Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya konektivitas angkutan umum dan konektivitas jalan	Rasio Konektivitas Kabupaten	2	0,43	21,50
		Persentase layanan angkutan	50%	35%	70
		V/C Ratio di Jalan Kab	0.5	0,37	74
2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	% Penurunan Temuan BPK	2%	2%	100
		Indek Kepuasan Masyarakat	90 %	88,30 %	98,11
		Nilai Sakip	70	68.35	97,64
		Level Maturitas SPIP	3	3	100
Rata – Rata Capaian					80.17

Untuk persentase (%) capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- a. $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$
(Jika realisasi tinggi menunjukan kinerja yang baik)
- b. $\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$
(Jika realisasi tinggi menunjukan kinerja yang tidak baik)

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dari 6 (enam) indicator tersebut rata – rata capaian indicator kinerja sasaran dinyatakan baik dari target yang telah ditetapkan.

C. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu Instansi Pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan.

Capaian Kinerja Organisasi yaitu penyajian terkait pencapaian masing – masing indicator kinerja per sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut :

C.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Dari 2 Sasaran strategi ditetapkan 6 indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024, Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Rasio Konektifitas Kabupaten
- 2) Persentase layanan angkutan
- 3) V/C ratio di Jalan Kab/Kota

- 4) % penurunan Temuan BPK
- 5) Indek Kepuasan Masyarakat
- 6) Nilai Sakip
- 7) Level Maturitas SIPD

Tabel III.3 Hasil Pengukuran Kinerja dari Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya konektivitas angkutan umum dan konektivitas jalan	Rasio Konektivitas Kabupaten	2	0,43	21,50
		Persentase layanan angkutan	50%	35%	70
		V/C Ratio di Jalan Kab	0.5	0,37	74
2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	% Penurunan Temuan BPK	2%	2%	100
		Indek Kepuasan Masyarakat	90 %	88,30 %	98,11
		Nilai Sakip	70	68.35	97,64
		Level Maturitas SPIP	3	3	100
Rata – Rata Capaian					80,17

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dari 6 (enam) indicator tersebut rata – rata capaian indicator kinerja sasaran dinyatakan baik dari target yang telah ditetapkan.

Berikut merupakan formulasi dari setiap indicator yang ditetapkan :

1. Indikator Kinerja Utama I :

Rasio Konektivitas Kabupaten

Rincian Data kebutuhan Trayek di Pasaman Barat

No	Rute	Layanan	Frekkuensi	Ket
1	Simpang Empat – Padang	Antar Kota antar Kab/Kota	>5x Seminggu	
2	Simpang Empat – Bukittinggi	Antar Kota antar Kab/Kota	>5x Seminggu	
3	Simpang Empat – Pekanbaru	Antar Kota antar Kab/Kota	>5x Seminggu	
4	Simpang Empat – Medan	Antar Kota antar Kab/Kota	>5x Seminggu	
5	Simpang Empat – Panti	Antar Kota antar Kab/Kota	>5x Seminggu	
6	Ujung Gading – Padang	Antar Kota antar Kab/Kota	>5x Seminggu	
7	Ujung Gading –	Antar Kota antar Kab/Kota	>5x Seminggu	

	Bukittinggi			
8	Simpang Empat – Mandailing natal	Antar Kota antar Kab/Kota	>5x Seminggu	

Rincian Data Trayek yang di layani :

No	Rute	Layanan	Frekkuensi	Bobot	Ket
1	Simpang Empat – Talu	Antar Kota dalam Kab/Kota	>5x Seminggu	1	Tinggi
2	Simpang Empat – Kinali	Antar Kota dalam Kab/Kota	>5x Seminggu	1	Tinggi
3	Simpang Empat – sasak	Antar Kota dalam Kab/Kota	>5x Seminggu	1	Tinggi
4	Simpang Empat – Ujung gading	Antar Kota dalam Kab/Kota	>5x Seminggu	1	Tinggi
5	Simpang Empat – Desa Baru	Antar Kota dalam Kab/Kota	>5x Seminggu	1	Tinggi
6	Ujung Gading – Mandiingin	Antar Kota dalam Kab/Kota	>5x Seminggu	1	Tinggi
7	Ujung Gading – Solok	Antar Kota antar Kab/Kota	3-4x Seminggu	0.8	sedang
8	Simpang Empat – Jambi	Antar Kota antar Kab/Kota	3-4x Seminggu	0.8	sedang
Jumlah				0.9	Rata rata bobot

Rincian Data kebutuhan Lintas di Pasaman Barat

No	Lintasan	Jalur	Frekkuensi	Ket
1	Kapal Perintis	Air Bangis – Mentawai	>3x Seminggu	

Rincian Data Lintas yang Dilayani di Pasaman Barat

No	Lintasan	Jalur	Frekkuensi	Bobot	Ket
1	Kapal Penyebrangan	Air Bangis – Pulau Panjang	>5x Seminggu	1	Tinggi
	Kapal Penyebrangan	Sasak – Maligi	>5x Seminggu	1	Tinggi

Rumus :

Rasio Konektivitas Kab/Kota Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020 :

= (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2xbobot angkutan sungai, danau dan penyebrangan)

IK1 = (angkutan Jalan)=(jumlah Trayek yang dilayani pada Kabupaten/kota bobot trayek)

jumlah kebutuhan pada Kabupaten/kota tersebut)

$$IK2 = \frac{(\text{angkutan penyebarangan}) = \text{jumlah lintas penyebarangan} \times \text{bobot lintas}}{\text{Jumlah kebutuhan intas penyebarangan kab/kota}}$$

Jumlah kebutuhan intas penyebarangan kab/kota

$$Ik1 = \frac{8 \times 0,5}{8} = 0,5$$

$$Ik2 = \frac{1 \times 0,5}{2} = 0,25$$

$$\begin{aligned} R &= (IK1 \times \text{bobot angkutan Jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot Angkutan SDP}) \\ &= (0,5 \times 70 \%) + (0,25 \times 30 \%) \\ &= 0,35 + 0,08 \end{aligned}$$

$$RK = 0,43$$

Ket :

Bobot Trayek atau Lintas:

- Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1
- Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0,8
- Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5

Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:

- Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)
- Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)

- Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)
- Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)

Berdasarkan rumus diatas Rasio Konektivitas Kabupten berdasarkan jumlah trayek yang ada baik angkutan darat maupun Angkutan penyebrangan di Kabupaten Pasaman Barat data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar 0,43, dengan capaian kinerja yaitu 21,50 %.

2. Indikator Kinerja Utama II

Persentase layanan angkutan

Rumus mengukur Persentase Layanan Angkutan berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

$$\frac{Jumlah\ Angkutan\ Darat}{Jumlah\ Penumpang\ Angkutan\ Darat} \times 100\%$$

$$\frac{4.086}{11.725} \times 100\% = 35\%$$

Berdasarkan jumlah Kapasitas angkutan darat bermotor dan angkutan laut berdasarkan data penurunan penumpang pada terminal Simpang Empat dibagi dengan jumlah penumpang adalah sebesar 35 %, dengan capaian kinerja yaitu 70 %.

3. Indikator Kinerja Utama III

V/C Ratio di Jalan Kab/Kota

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

Nama Kecamatan	No	Nama Ruas	Panjang (km)	Co	Fcw	FCsp	FCsf	Volume (smp/jam)	Kapasitas Jalan (smp/jam)	V/C Ratio	Level Of Services
Pasaman	1	Jl. Raya Pasaman-Gunung Tuleh	8.41	2900	0.87	1	0.86	1081	1866	0.58	C
Luhak Nan Duo	2	Jl. Raya Luhak Nan Duo - Pasaman	5.84	2900	1.14	1	1	1115.95	2083	0.54	C
Kinali	3	Jl. Raya Kinali- Luhak Nan Duo	7.32	2900	1	1	0.97	654.42	2040	0.32	B
Ranah Pasisie	4	Jl. Raya Pasaman- Sasak	7.11	2900	1.29	1	0.97	815.04	2040	0.40	B
Sungai Aur	5	Jl. Raya Sungai Aur - Lembah Melintang	6.23	2900	1	1	1	547.24	1313	0.42	C
Gunung Tuleh	6	Jl. Raya Gunung Tuleh- Sungai Aur	7.52	2900	1.14	1	0.97	661.16	2040	0.32	B
Lembah Melintang	7	Jl. Raya Lembah Melintang - Koto Balingka	6.33	2900	0.87	1	0.97	356.98	1313	0.27	B
Koto Balingka	8	Jl. Raya Koto Balingka - Sungai Bremas	7.82	2900	1.25	1	1	586.87	2040	0.29	B
Ranah Batahan	9	Jl. Raya Ranah Batahan	5.49	2900	0.87	1	0.94	292.75	1313	0.22	B
Talamau	10	Jl. Raya Pasaman - Talamau	8.24	2900	1	1	1	197.9	1313	0.15	A
Sungai Bremas	11	Jl. Raya Sungai Bremas - Ranah Batahan	7.21	2900	1	1	1	686.4	1313	0.52	C
Jumlah								6995.71	18674	0.37	B

$$\begin{aligned} \text{Formula Penghitungan} &= \text{V/C Rasio di jalan Kab X100 \%} \\ &= 699.571 / 18.674 \times 100 \% \\ &= 0,37 \end{aligned}$$

- V/C Ratio adalah Perbandingan antara Volume lalu lintas dengan kapasitas jalan
- = (Volume Lalu Lintas Kendaraan di ruas Jalan Kabupaten) / (Kapasitas Ruas Jalan Kabupate)
- Sesuai standar MKJI (manual Kapasitas Jalan Indonesia) dan PKJI (Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia) 2014. Semakin tinggi kecepatan waktu tempuh menunjukan semakin baik kinerja lalu lintas.

Berdasarkan rumus diatas dapat diketahui V/C Rasio diruas jalan Kabupaten adalah 0,37, dapat diketahui kinerja lalu lintas diruas jalan Kabupaten dapat diartikan bahwa kinerja lalu lintas bagus, arus cukup stabil, dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi di batasi dalam memilih kecepatan. Berdasarkan survey lalu lintas dan pengamatan kepada pengendara kendaraan bermotor di sepanjang jalan Kabupaten, yang dilakukan oleh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.

4. Indikator Kinerja Utama IV

% Penurunan Temuan BPK

Diukur berdasarkan hasil temuan BPK Dinas perhubungan Kabupaten Pasaman Barat yang dilaksanakan oleh BPK RI Perwakilan Propinsi Sumatera Barat

Penurunan Temuan BPK dihitung berdasarkan :

1. Identifikasi temuan hasil audit BPK pada Tahun berjalan (t)
2. Identifikasi temuan hasil audit BPK pada Tahun sebelumnya (t-1)
3. Hitung temuan BPK yang terjadi berulang dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah temuan BPK tahun berjalan (t) yng terjadi berulang}}{\text{Jumlah temuan BPK tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100$$

Berdasarkan data dari insfektoran Dinas Perhubungan tiak terdapat temuan BPK pada Tahun berjalan yang terjadi secara berulang dan tidak terdapat juga temuan BPK di Tahun sebelumnya, dengan capaian kinerja 100 %

5. Indikator Kinerja Utama IV

Indek Kepuasan Masyarakat

Diukur berdasarkan hasil penilaian 9 unsur layanan yaitu; persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, kualitas pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dari nilai rata-rata tertimbang pada masing-masing unsur pertanyaan dengan jenis data berupa data ordinal. Nilai SKM dihitung dengan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks SKM terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki pertimbang yang sama dengan rumus yaitu bobot nilai rata-rata tertimbang = jumlah bobot dibagi jumlah unsur yaitu $1/9 = 0,111$

$$\text{Nilai Rata – Rata (NRR)tertimbang} = \frac{\text{nilai bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$$

Untuk memperoleh nilai-nilai SKM berupa indeks kepuasan masyarakat (IKM) unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus yaitu nilai total persepsi per unsur dibagi nilai total unsur yang terisi dikali nilai penimbang atau $\text{IKM} = \text{total nilai persepsi per unsur} / \text{total unsur yang terisi} \times \text{nilai rata-rata tertimbang}$.

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM antara 25-100 maka dilakukan konversi dengan nilai dasar 25 yaitu dengan cara $\text{SKM unit pelayanan} \times 25$

$$\text{SKM unit pelayanan} \times 25$$

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit pelayanan.

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,064-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Hasil Survai provit responden indeks pelayanan masyarakat

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
U1	Persyaratan Pelayanan	3,570

U2	Prosedur Pelayanan	3,500
U3	Waktu Pelayanan	3,420
U4	Kualitas Pelayanan	3,640
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,420
U6	Kompetensi Pelaksana Pelayanan	3,500
U7	Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,700
U8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,480
U9	Sarana dan Prasarana	3,560

Nilai Rata-rata per Unsur dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & (3,570 \times 0,111) + (3,500 \times 0,111) + (3,420 \times 0,111) + (3,640 \times 0,111) + (3,420 \times 0,111) + \\ & (3,500 \times 0,111) + (3,700 \times 0,111) + (3,480 \times 0,111) + (3,560 \times 0,111) \\ & = 3,528 \\ & = \text{SKM Unit Palayanan} \times 25 \\ & = 3,528 \times 25 \\ & = 88,30 \text{ (IKM Kategori B)} \end{aligned}$$

Data tersebut diatas diperoleh berdasarkan survei jumlah pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.

6. Indikatot Kinerja Utama V Nilai Sakip

Nilai Sakip diukur berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja organisasi perangkat Daerah oleh Insfektorat Kabupaten Pasaman Barat yang dilaksanakan pada Tahun n.

Berdasarkan hasil Penilaian Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang dilaksanakan oleh Insfektorat Kabupaten Pasaman Barat maka diperoleh nilai Sakip Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat adalah 68,35, dengan capaian kinerja yaitu 97,64 %, berdasarkan data dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

7. Indikator Kinerja Utama VI Level Maturitas SPIP

Level Maturitas SPIP berdasarkan nilai langsung dari BPKP Propinsi Sumbar melalui Insfektorat Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan hasil level Maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP Propinsi Sumbar diperoleh level Maturitas SPIP Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat adalah 3, dengan Capaian kinerja 100 %

C 2. Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Pada Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat berdasar Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2021 – 2026 terjadi perbedaan dalam penentuan sasaran strategi dan indikator kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat, dimana Tahun 2024 adalah Tahun awal untuk Renstra Dinas Perhubungan periode 2021 – 2026, dikarenakan untuk Tahun 2021 merupakan bagian Renstra Dinas perhubungan 2016 - 2021 dan merupakan Tahun Dasar (Kondisi Awal) terhadap Target pada Tahun 2024.

Tabel III. 4 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Kinerja Tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024		Realisasi		% Capaian	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Meningkatnya konektivitas angkutan umum dan konektivitas jalan	Rasio Konektivitas Kabupaten	1,9	1,9	0,79	0,43	39,50	21,50
		Persentase layanan angkutan	50%	50%	30%	35%	60	70
		V/C Ratio di Jalan Kab	0.5	0.5	0,54%	0,37%	98	74
2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	% Penurunan Temuan BPK	3%	3%	2%	2%	100	100
		Indek Kepuasan masyarakat	90 %	90 %	88,30 %	88,30 %	98,11	98,11
		Nilai Sakip	70	70	68,35	68,35	97,64	97,64
		Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	100	100
Rata – Rata Capaian							84,75	80,75

C 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat dalam dokumen Perencanaan Startegis Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat

Tabel III.5 Target Jangka menengah Yang Terdapat Dalam dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran pada Tahun n						
			2021	2022	2024	2024	Realisasi	2025	2026
1	Meningkatnya konektivitas angkutan	Rasio Konektivitas Kabupaten	1,9	1,9	2	2	0,79	2,1	2,1

	umum dan konektivitas jalan	Persentase layanan angkutan	45%	45%	50%	50%	30%	60%	60%
		V/C Ratio di Jalan Kab	0.5	0.5	0,5	0,5	0,54%	0,4	0,4
2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	% Penurunan Temuan BPK	3%	3%	2%	2%	2%	0%	0%
		Indek Kepuasan Masyarakat	-	-	90 %	90 %	88,30 %	90 %	90 %
		Nilai Sakip	70	70	70	70	68,35	80	80
		Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	4	4

Dari Tabel diatas dapat dilihat target masing – masing indicator kinerja sasaran setiap Tahunnya beserta realisasinya pada Tahun 2024.

Berdasarkan table diatas masih ada beberapa tahun lagi untuk dapat melihat tingkat kemajuan terkait capaian Renstra Dinas perhubungan Kabupaten Pasaman Barat, dikarenakan untuk Tahun 2024 merupakan tahun awal dari perencanaan yang ada pada Renstra 2021 – 2026, yang nantinya berdasarkan capaian pada tahun 2024 ini diharapkan bias menjadi evaluasi untuk pencapaian target pada tahun – tahun sebelumnya.

C.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Kementrian Perhubungan)

1. Visi Misi Kementrian Perhubungan

Berdasarkan 7 (Tujuh) prioritas nasional yang terdapat pada RPJMN 2020- 2024, salah satunya yaitu “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan Dasar “

Kemudian dengan mempertimbangkan Visi dan Misi Presiden pada Tahun 2020 – 2024 dimana sector perhubungan mempunyai focus kegiatan yang harus ditangani untuk menunjang capaian misi, terutama pada misi 2 misi 3 dan misi 4, maka hal ini menjadi dasar bagi kementrian Perhubungan dalam pelaksanaan pembangunan dan Penyusunan rencana Strtegis pada Tahun 2020 – 2024.

Visi Kementrian Perhubungan adalah “ Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden”.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang – undangan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka ditetapkan misi Kementerian Perhubungan sebagai berikut :

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi
3. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan
5. Mewujudkan penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan masyarakat.

2. Visi Misi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026 adalah :

“ Mewujudkan Pasaman Barat Yang Beriman, Cerdas, Sehat, Bermartabat, Sejahtera, Serta Berwawasan Lingkungan ”.

Sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan maka dibuatlah misi untuk mencapai visi tersebut. Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat mendukung tercapainya Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Misi 2, Misi 5 dan Misi 6 Yaitu :

- **Misi 2 yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berwawasan kependudukan (Population responsive dan gender responsive).**
- **Misi 5 yaitu Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.**
- **Misi 6 yaitu Mewujudkan pembangunan wilayah yang berkeadilan, serta mengelola sumber daya alam dan penataan ruang secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan**

Kemudian sebagai OPD Penanggungjawab, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tujuan – tujuan yang harus dicapai berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026.

Dengan demikian menunjukkan bahwa adanya relevansi antara visi misi kementerian Perhubungan, Visi Misi Kepala Negara dan kepala Daerah periode berjalan dengan dukungan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dalam membantu mewujudkan visi misi tersebut, dimana kata kunci dalam pelaksanaan pembangunan Sektor Perhubungan secara umum yaitu terkait pembangunan infrastruktur yang dapat membantu penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan serta meningkatkan keselamatan transportasi.

Tabel III. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 dengan Kementerian Perhubungan

Tujuan		Sasaran Strategis							
Nas	Kab	Nas	Kab	Nas	Kab	Nas	Kab	Nas	Kab

Tujuan		Sasaran strategis		Indikator Kinerja Sasaran		2024			
						Target		Realisasi	
Nasional	Kab	Nasional	Kab	Nasional	Kab	Nas	Kab	Nas	Kab
Meninngkatnya aksesibilitas Masyarakat Terhadap jasa layanan transfortasi		Meningkatnya Konektivitas antar antar wilayah IK; Rasio Konektivitas	Meningkatnya konektivitas angkutan umum dan konektivitas jalan	Rasio Konektivitas Nasional	Rasio Konektivitas As Kab	0,781	2	0.57	21,50
Meningkatnya kinerja layanan Transportasi		Meningkatnya kinerja Pelayanan Transportasi	Meningkatnya konektivitas angkutan umum dan konektivitas jalan	Indek kepuasaan Masyarakat terhadap pelayanan public sector Tarnsportasi	Persentase layanan angkutan	88,5	50%	95.62	35%
Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi		Terwujudnya keselamatan Transportasi IK: Rasio Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Meningkatnya konektivitas angkutan umum dan konektivitas jalan	Rasio kejadian kecelakaan Transportasi per 1 juta keberangkatan	V/C Ratio di Jalan Kab	17.26	0.5	18.6	0,37

Sumber data terkait tujuan, sasaran strategis dan indicator kinerja sasaran Kemenrtian

Perhubungan diperoleh dari Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 2738 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Program Dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. sedangkan untuk data target dan realisasi kementerian Perhubungan diperoleh dari website http://eperformance.dephub.go.id/indek.php/public/capaian_kementerian.

C.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program / kegiatan Yang menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Daerah termasuk Prestasi kerja yang dicapai atas Penggunaan Anggaran. Prestasi Kerja yang dimaksud disini adalah kinerja yang didefinisikan sebagai keluaran / hasil dari kegiatan / Program yang hendak dicapai sehubungan dengan Penggunaan Anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk pencapaian kinerja terbaik tentunya memerlukan analisa yang tepat, menyangkut Sumber Daya yang ada, antara lain :

- a. Sumber Daya Manusia
- b. Sumber Dana / anggaran

Analisis dari efisiensi sumber daya dari kondisi yang ada saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

- 1) Dalam hal pengelolaan SDM, harus mendapatkan perhatian khusus, terutama berkaitan dengan Analisa jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK). Sehingga pendistribusian pegawai sesuai dengan kebutuhan, terutama pada bidang – bidang yang terkait langsung dengan pencapaian target kinerja.
- 2) Kompetensi, disiplin, kemampuan, profesionalitas dan produktifitas sebagian besar PNS belum memadai.
- 3) Kurangnya tenaga yang kompeten yang harus diminimalisir dengan memperbanyak kuantitas (volume) diklat – diklat teknis yang berkesesuaian dengan kebutuhan kerja.
- 4) Terkait dengan kebutuhan tenaga teknis di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat sudah dilakukan kerjasama (MoU) dengan pihak Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat). Dimana dari Tahun 2016 sampai Tahun 2024, bertambahnya pegawai teknis di Dinas Perhubungan dari lulusan Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD.

b. Sumber Dana / anggaran

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran sangat menentukan dalam pencapaian target

kinerja. Karena dalam target kinerja OPD, yang diukur tidak hanya pencapaian fisik dari kegiatan, tetapi juga realisasi keuangan dari pelaksanaan kegiatan. Karena hal ini memperlihatkan sesuai atau tidaknya proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kegiatan.

Untuk mendukung urusan wajib perhubungan Tahun Anggaran 2024 dialokasikan APBD Kabupaten Pasaman Barat Dari anggaran belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 Dari anggaran belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 sebesar Rp6.388.433.991,00 dan yang terealisasi sampai Per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.126.729.737,00 atau sebesar 95,90 %. Bila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2023 sebesar 98,82% belanja tahun ini turun sebesar 2,92 %. Rencana dan realisasi belanja dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Belanja Operasi

Belanja Operasi dalam Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp5.564.615.991,00 dan telah direalisasikan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.500.332.212,00 atau sebesar 98,75 % dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam Tahun 2024 direncanakan sebesarRp3.629.671.591,00 dan telah direalisasikan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.628.562.225,00 atau sebesar 99,97%.

Belanja Tidak Langsung Dinas Perhubungan digunakan untuk membiayai :

1. Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2024 seperti yang tertera pada tabel diatas. Dimana jumlah Pegawai Dinas Perhubungan per 31 Desember 2024 berjumlah 33 orang, dengan rincian pegawai sebagai berikut :

Golongan II =7 orang

Golongan III= 19 orang

Golongan IV=7 orang

2. Belanja Tambahan penghasilan Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2024 seperti Tambahan Pengasilan berdasarkan beban kerja, Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja dan tambahan penghasilan berupa uang makan dan minum harian pegawaiyang besaran pembayarannya diatur dalam Peraturan Bupati No 99 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

3. Belanja Honorarium

Belanja Honorarium terdiri dari Honorarium Penanggungjawab pengelola Anggaran, Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa dan belanja jasa pengelola BMD yang tidak menghasilkan pendapatan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dalam Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp1.934.944.400,00 dan telah direalisasikan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.871.769.987,00 atau sebesar 96.74%.

c. **Belanja Modal**

Belanja modal dalam Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp823.818.000,00 dan telah direalisasikan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp626.397.525,00 atau sebesar 76.04%. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2023 sebesarRp1.247.322.900,00 Belanja Modal tahun 2024 turun sebesar Rp524.008.839,00 atau sebesar 83.65 %.

Dari hasil analisa terhadap program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, dapat ditarik kesimpulan :

- 1. Konsistennya Perencanaan dengan proses pelaksanaan kegiatan;
- 2. Adanya perencanaan yang matang didalam menyusun suatu program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan.
- 3. Penetapan Indikator Kinerja yang tepat, terukur dan dapat dicapai;
- 4. Pengawasan dan evauasi terhadap semua kegiatan, terutama yang rutin dilaksanakan setiap tahun;
- 5. Koordinasi yang intens baik internal maupun eksternal.

J. **REALISASI ANGGARAN**

Tabel III.7 Rincian Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 sebesar Rp6.388.433.991,00

No	Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
1	Belanja Operasi	5.564.615.991	5.500.332.212	98,84
	- Belanja Pegawai	3.629.671.591	3.628.562.225	99,97
	- Belanja Barang dan Jasa	1.934.944.400	1.871.769.987	96,74
2	Belanja Modal	823.818.000	626.397.525	76,04
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	823.818.000	626.397.525	76,04
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
TOTAL		6.388.433.991	6.126.729.737	95,90

Tabel III.8 Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 sesuai dengan Program

No	Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
1	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	4.581.484.971	4.534.071.612	98.97
2.	<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	1.736.963.220	1.527.537.925	87.94
3.	<i>Program Pengelolaan Pelayanan</i>	69.985.800	85.120.200	93.05
TOTAL		6.388.433.991	6.126.729.737	95.90

Tabel III.9 Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 sesuai dengan Program, kegiatan dan Sub kegiatan

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	
			Rp	%
1	2	3	4	
	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>4.581.484.971</i>	<i>4.534.071.612</i>	<i>98,97</i>
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>3.999.602.991</i>	<i>3.995.022.725</i>	<i>99,89</i>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.502.351.491	3.501.242.225	99,97
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	405.114.000	401.647.000	99,14
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	92.137.500	92.133.500	100,00
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>2.700.000</i>	<i>2.660.000</i>	<i>-</i>
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2.700.000	2.660.000	98.51
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>209.294.600</i>	<i>182.703.764</i>	<i>87,30</i>
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.300.000	1.297.500	99,81
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.215.800	30.767.500	76,51
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.778.800	150.638.764	89,78
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda</i>	<i>8.985.000</i>	<i>8.985.000</i>	<i>100,00</i>
8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.985.000	8.985.000	100,00
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>46.504.435</i>	<i>46.084.543</i>	<i>99,10</i>
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dava Air dan Listrik	47.191.600	46.084.543	97,65
		4.267.087.026	4.235.456.032	99,26

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran	Realisasi keuangan	
			Rp	%
1	2	3	4	
		4.267.087.026	4.235.456.032	99,26
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	314.397.945	298.615.580	94,98
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	143.655.700	132.927.350	107,58
11	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	12.590.000	12.045.000	95,67
12	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	134.106.950	129.601.950	96,64
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.045.295	24.041.280	99,98
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.736.963.220	1.527.537.925	87,94
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	963.012.350	761.693.525,00	79,09
14	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	814.833.000	617.412.525	75,77
15	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	148.179.350	144.281.000	97,37
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	63.085.750	63.004.900	99,87
16	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terminal Tipe C	63.085.750	63.004.900	99,87
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	182.689.000	180.128.300,00	98,60
17	Penyediaan Sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ¹	81.000.000	80.996.600	100,00
18	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	63.050.000	63.050.000	100,00
19	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25.700.000	25.700.000	100,00
20	Koordinasi penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12.939.000	10.381.700	80,24
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan kab/Kota	241.819.000	241.735.600	99,97
21	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kab/Kota	241.819.000	241.735.600	99,97
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	286.357.120	280.975.600	98,12
22	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	286.357.120	280.975.600	98,12
	Program Pengelolaan Pelayaran	69.985.800	65.120.200	93,05
	Penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyebrangan dalam daerah kab/kota	69.985.800	65.120.200	93,05
23	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	69.985.800	65.120.200	93,05
JUMLAH		6.388.433.991	6.126.729.737	95,90

BAB IV

PENUTUP

Dengan selesainya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2024, yang disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan Penetapan Kinerja sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam satu Tahun. Secara umum kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 berhasil melaksanakan kegiatan dengan nilai rata – rata capaian indikator kinerja sasaran yaitu 84,75 % dari 100% , dengan nilai 85% kinerja dinas perhubungan berhasil untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian pada sasaran kinerja konektivitas dari target 2 tercapai 0,43 atau 21,50%, untuk persentase layanan angkutan dengan target 50% tercapai 35% atau 70 %, untuk V/C Ratio Jalan Kabupaten Dengan target 0,5 tercapai 0,37 atau 74%.

Berdasarkan uraian dan analisis kinerja dari belanja langsung sebagaimana diungkapkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas perhubungan telah terealisasi fisiknya 98% dan akuntabilitas keuangan mencapai 95.90%, namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan – penyempurnaan Kinerja Dinas Perhubungan, khususnya Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang

Sasaran Strategis belum mencapai 100 % karena di pengaruhi oleh faktor penghambat di antaranya :

1. Kurangnya keinginan masyarakat menggunakan Tranfortasi Umum
2. Kurangnya konektivitas yang menghubungkan antar daerah baik angkutan darat maupun angkutan laut.
3. Kurangnya manajemen lalu lintas yang memadai.

Terhadap kondisi tersebut, strategi di masa mendatang yang perlu dikembangkan adalah :

- a. Memberikan pelayanan yang prima dengan cara meningkatkan fasilitas dan meremajakan kendaraan angkutan umum sehingga mempunyai daya tarik masyarkat untuk menggunakan transfortasi umum.
- b. Menambah rute trayek angkutan umum dengan mengajukan proposal kepada Dirjen Perhubungan Darat.
- c. Dilakukan penjadwalan jam operasional kendaraan pribadi pada jalan Kabupaten, dan menyediakan angkutan umum agar masyarakat beralih menggunakan transfortasi umum.
- d. yang belum ada dengan melakukan Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan

senantiasa mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) / Renstra yang telah disusun dan disepakati bersama.

- e. Meningkatkan responsibilitas aparatur terhadap segala permasalahan yang timbul, sehingga ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dapat ditekan/menurun.
- f. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi di tingkat manajerial, guna pencapaian kinerja yang lebih baik.
- g. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk menunjang pencapaian target kinerja dinas secara maksimal.

Penyusunan LKJIP 2024 masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi komitmen bersama, untuk perbaikan dan penyempurnaan LKJIP :

- 1. Mewujudkan dokumen perencanaan kinerja yang didukung dengan target – target indicator kinerja (input, output, outcome) yang terukur.
- 2. Mewujudkan Sistem Manajemen Kinerja yang komprehensif dan transparan di masing – masing unit kerja dengan mengacu pada perkembangan data indicator kinerja Utama.
- 3. Indikator Kinerja Utama betul – betul diaplikasikan sebagai alat evaluasi kinerja untuk melihat keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai program – program Pemerintahan dan pembangunan.
- 4. Agar setiap Unit Kerja membangun data kinerja yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan.
- 5. Masing – masing unit kerja dapat melakukan analisis efisiensi dan efektivitas dengan didasarkan pada capaian indicator kinerja input, output dan outcome.